

**PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH,  
TINGKAT KEMISKINAN DAERAH, DAN TINGKAT PENDIDIKAN PETAHANA  
TERHADAP *POLITICAL BUDGET CYCLE*  
MENJELANG PEMILUKADA**

**(Tesis)**

**Oleh**

**MARIA MARANATHA GULTOM**

**NPM 2121031003**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH,  
TINGKAT KEMISKINAN DAERAH, DAN TINGKAT PENDIDIKAN PETAHANA  
TERHADAP *POLITICAL BUDGET CYCLE*  
MENJELANG PEMILUKADA**

**Oleh**

**Maria Maranatha Gultom**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH, TINGKAT KEMISKINAN DAERAH, DAN TINGKAT PENDIDIKAN PETAHANA TERHADAP *POLITICAL BUDGET CYCLE* MENJELANG PEMILUKADA**

**Oleh:**

**Maria Maranatha Gultom**

Penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi praktik *political budget* yang dilakukan oleh kepala daerah *incumbent* menjelang pemilukada. Pengujian dilakukan terhadap 398 Kabupaten/Kota di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan menggunakan *eviews* 10.

Peneliti menemukan bahwa kepala daerah *incumbent* yang memimpin daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi akan cenderung meningkatkan pengeluaran belanja modal, sedangkan kepala daerah *incumbent* yang memimpin daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan cenderung meningkatkan pengeluaran belanja bantuan sosial saat menjelang pemilukada, dan Kepala daerah *incumbent* yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tetap memiliki sikap yang oportunistik dan ambisi yang tinggi sehingga akan cenderung meningkatkan pengeluaran belanja bantuan sosial menjelang pemilukada.

Kata Kunci: *political budget*, *incumbent*, dan pemilukada

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF REGIONAL FISCAL INDEPENDENCE LEVEL, REGIONAL POVERTY, AND EDUCATION LEVEL OF INCUMBENTS ON POLITICAL BUDGET CYCLE IN ELECTION YEARS**

**By**

**Maria Maranatha Gultom**

This study examines the factors that influence budgetary political practices carried out by incumbent regional heads ahead of the post-conflict local election. Tests were carried out on 398 districts/cities in Indonesia. Data analysis was performed by panel data regression analysis using eviews 10.

The researcher found that incumbent regional heads who lead regions with a high degree of fiscal independence will tend to increase capital expenditure expenditures, while incumbent regional heads who lead regions with a high poverty rate will tend to increase spending on social assistance spending ahead of local elections, and incumbent regional heads who have a high level of education still has an opportunistic attitude and high ambition so that it tends to increase spending on social assistance ahead of the local election.

Keywords: political budget, incumbents, and post-conflict local elections

Judul : **PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH,  
TINGKAT KEMISKINAN DAERAH, DAN  
TINGKAT PENDIDIKAN PETAHANA TERHADAP  
POLITICAL BUDGET CYCLE MENJELANG  
PEMILUKADA**

Nama Mahasiswa : **Maria Maranatha Gultom**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2121031003

Fakultas : **Ekonomi dan Bismis**



2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**

NIP. 19750620 200012 2 001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.

Anggota Penguji : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.

*Fajar Gustiawaty Dewi*  
.....  
*Fitra Dharma*  
.....  
*Rindu Rika Gamayuni*  
.....  
*Usep Syaipudin*  
.....



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1 003

### 3. Direktur Program Pasca Sarjana

*Murhadi*  
Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 10 April 2023

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Maranatha Gultom

NPM : 2121031003

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Kemiskinan Daerah, dan Tingkat Pendidikan Petahana terhadap *Political Budget Cycle* menjelang Pemiluakada” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai ajuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 April 2023



**Maria Maranatha Gultom**

**NPM. 2121031003**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Maria Maranatha Gultom di lahirkan di Pontianak, 03 Februari 1996 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari Bapak AKBP Hamonangan Gultom, S.H., M.H dan Ibu Dra. Merita Marpaung.

Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Fransiskus 2 Rawalaut, pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Immanuel Bandar Lampung hingga tahun 2014.

Penulis melanjutkan Pendidikan di jenjang Sarjana (S1) di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, dan lulus di tahun 2019. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjananya pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis bercita-cita ingin melanjutkan karirnya menjadi Dosen untuk mencerdaskan Anak Bangsa.



## **MOTTO**

*“Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu,  
dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”*

**(Ayub 42:2)**

*“Ad Maiorem Dei Gloriam”*

*For the Glory of God*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, pertolongan, dan anugerahNya melalui orang-orang yang telah membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis

dan menyelesaikan tesis ini.

Kupersembahkan tesis ini

Sebagai tanda cinta dan terimakasih kepada

**Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

**Papa Hamonangan Gultom, dan Mama Merita Marpaung**

yang selalu mendukung, mengasihi, membantu, dan mendoakan ku tanpa henti.

Terimakasih Papa dan Mama.

**Adik ku tersayang,**

**Gabriel Advenia Gultom**

**Bonifasius Victor Imanuel Gultom**

yang selalu mengasihi, mendukung, menyemangati, dan mendoakan tanpa henti.

**Serta**

**Almamater tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, rahmat, dan kasih setia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Kemiskinan Daerah, dan Tingkat Pendidikan Petahana terhadap *Political Budget Cycle* menjelang Pemiluakada”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si ., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si, Ak., Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi dan sebagai dosen pembahas satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan waktu, dukungan, arahan, dan masukan selama bimbingan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, dukungan, motivasi, dan inspirasi selama bimbingan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak, selaku dosen pembahas kedua yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan inspirasi yang berharga dalam penelitian, dan pembelajaran bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10. Papa dan mama tersayang yang senantiasa mendukung, mendorong, dan mendoakan tiada henti agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Adik-adik tersayang dan tercinta “sobat subuh” yang selalu mendukung dan mendoakan setiap saat.
12. Teman-teman MIA 2021: Mba Rindy yang selalu memberikan motivasi dan informasi terkait perkuliahan. Mba Erni yang selalu memotivasi dan

mendukung selama perkuliahan. Mba Imas yang heboh, lucu, dan humoris. Hasna yang selalu menjadi koordinator konsumsi makan siang, dan membantu memberikan informasi terkait perkuliahan. Arum yang selalu membantu selama perkuliahan. Mba Novi; Mba Selly; Mba Dewi “nyai” yang menyemangati aku selama kerja kelompok dan sampai perkuliahan selesai. Basit Bashiri yang selalu mendukung dan menjadi teman bertukar pikiran. Mba Navira dan Mas Fitra yang couple goals. Intan teman sekamar di Malaysia-Thailand. Mas Wempy si ketua kelas. Mba Indri yang paling aktif di kelas. Ayu si *cheerful girl*. Mba Ria dan Putri yang jadi teman makan bakso. Sema, Nanda, dan Mba Indah teman ngemil dan makan siang. Semua teman-teman MIA 2021, *YOU GUYS ROCK!*

13. Semua pihak yang sudah banyak membantu selama perkuliahan berlangsung.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 12 April 2023

**Maria Maranatha Gultom**  
**NPM. 2121031003**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	7
2.1.1. <i>Signaling Theory</i> .....	7
2.1.2. <i>Agency Theory</i> .....	9
<b>2.2. Kajian Pustaka</b> .....	10
2.2.1. <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b> .....	10
2.2.2. <b>Belanja Daerah</b> .....	12
2.2.3. <b>Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia</b> .....	16
2.2.4. <i>Incumbent</i> .....	16
2.2.5. <b>Tingkat Kemandirian Daerah</b> .....	18
2.2.6. <b>Tingkat Kemiskinan</b> .....	19
2.2.7. <b>Tingkat Pendidikan <i>Incumbent</i></b> .....	20
2.2.8. <b>Siklus Anggaran Politik (<i>Political Budget Cycle</i>)</b> .....	21
<b>2.3. Penelitian Sebelumnya</b> .....	23
<b>2.4. Hipotesis Penelitian</b> .....	25
2.4.1. <b>Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial</b> .....	25
2.4.2. <b>Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal</b> .....	26
2.4.3. <b>Tingkat Kemiskinan terhadap Belanja Bantuan Sosial</b> .....	28
2.4.4. <b>Tingkat Kemiskinan terhadap Belanja Modal</b> .....	29
2.4.5. <b>Tingkat Pendidikan <i>Incumbent</i> terhadap Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal</b> .....	31
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	33

<b>3.1.</b>	<b>Populasi dan Sampel Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Populasi Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1.2.</b>	<b>Sampel Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2.</b>	<b>Jenis Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.3.</b>	<b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.4.</b>	<b>Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>35</b>
<b>3.4.1.</b>	<b>Variabel Dependen .....</b>	<b>35</b>
<b>3.4.1.1.</b>	<i>Political Budget Cycle</i> .....	<b>35</b>
<b>3.4.2.</b>	<b>Variabel Independen .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4.2.1.</b>	<b>Tingkat Kemandirian Daerah .....</b>	<b>36</b>
<b>3.4.2.2.</b>	<b>Tingkat Kemiskinan .....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.2.3.</b>	<b>Tingkat Pendidikan <i>Incumbent</i> .....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.3.</b>	<b>Variabel Control .....</b>	<b>38</b>
<b>3.4.3.1.</b>	<b>Total Anggaran Belanja .....</b>	<b>38</b>
<b>3.5.</b>	<b>Model Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>3.6.</b>	<b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6.1.</b>	<b>Analisis Statistik Deskriptif .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6.2.</b>	<b>Analisis Regresi Data Panel .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6.3.</b>	<b>Metode Pemilihan Model .....</b>	<b>42</b>
<b>3.7.</b>	<b>Uji Hipotesis .....</b>	<b>43</b>
<b>3.7.1.</b>	<b>Uji Koefisien Determinasi .....</b>	<b>43</b>
<b>3.7.2.</b>	<b>Uji F test .....</b>	<b>43</b>
<b>3.7.3.</b>	<b>Uji t test .....</b>	<b>44</b>
<b>3.7.4.</b>	<b>Variabel Dummy .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>45</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>.....</b>	<b>45</b>
<b>5.1.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>5.2.</b>	<b>Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>5.3.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 3.1 Tabel purposive sampling.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 3.2 Kriteria tingkat kemandirian daerah.....</b>	<b>36</b>
<b>Table 3.3 Variabel Operasional .....</b>	<b>38</b>



# BAB I

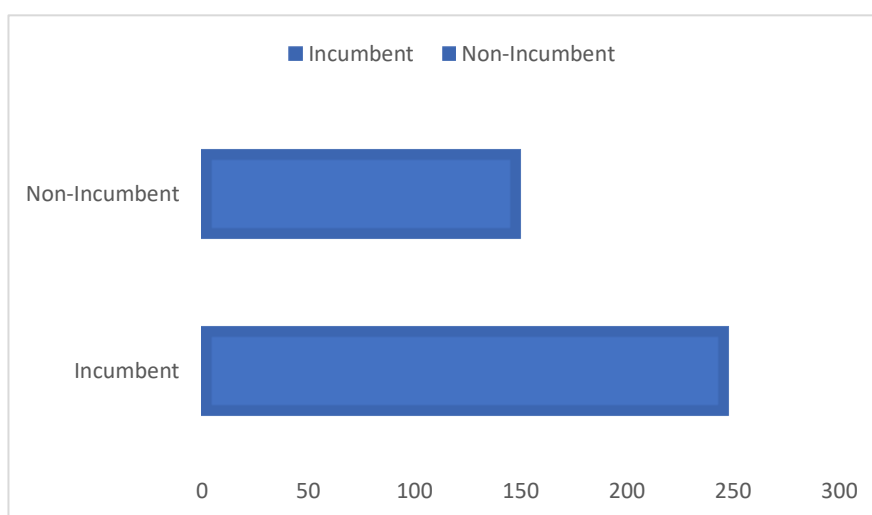
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelantikan seorang kepala daerah merupakan titik awal dari pelaksanaan janji-janji politik yang telah ditawarkan ketika kampanye berlangsung. Janji-janji politik kepala daerah tidak akan jauh dari isu terkait peningkatan layanan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Janji politik kepala daerah ini diterjemahkan menjadi program kerja yang kemudian dituangkan dalam APBD. Program kerja yang telah tercantum dalam APBD selanjutnya dieksekusi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Pemda bersangkutan (Ritonga dan Alan, 2010). Namun, keberadaan anggaran belanja seringkali menjadi perhatian dalam mempercepat pencapaian tujuan dari kepala daerah terutama untuk kepentingan politik, sehingga timbulnya penyalahgunaan APBD yang tidak sesuai dengan *value of money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Penggunaan anggaran untuk kepentingan politik kepala daerah ini menjadi ‘taktik’ yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara kepala daerah *incumbent*.

Taktik ini sering disebut sebagai siklus anggaran politik (*political budget cycle*), *political budget cycle* adalah fluktuasi periodic dalam kebijakan fiskal pemerintah, yaitu dipengaruhi oleh siklus pemilu sehingga sebelum pemilu/pilkada, pemerintah pusat atau daerah sering melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah; seperti peningkatan belanja atau penurunan tarif pajak pada tahun pemilihan yang dimotivasi oleh keinginan *incumbent* untuk dapat terpilih Kembali (Shi and Svensson, 2003). Menurut Galli and Rossi (2002) "*Political budget cycle*" muncul karena adanya asimetri informasi tentang kompetensi *incumbent* dalam mengelola produksi barang public. Dan menurut Dharma (2022) *political budget cycle* merupakan

penggunaan anggaran untuk kepentingan politik kepala daerah terutama kepentingan politik pemenangan pemilukada berpengaruh pada perolehan suara *incumbent*, biasanya political budget menggunakan instrument anggaran yang dapat dinikmati dan berkaitan langsung dengan rakyat (voters). Menurut Brender and Drazen (2003) *political budget cycle* lebih sering terjadi di negara berkembang, hal ini didorong oleh pengalaman 'demokrasi baru', di mana manipulasi fiskal lebih efektif terjadi karena kurangnya pengalaman dengan politik elektoral atau minimnya informasi yang diperoleh pemilih daripada di negara maju dengan demokrasi yang lebih mapan.



**Gambar 1.1** Diagram kemenangan non *incumbent* vs *incumbent* dalam Pilkada 2020, 2018, 2017.

Diagram pada gambar 1.1 menggambarkan bahwa lebih banyak *incumbent* yang memenangkan Pemilukada daripada non-*incumbent*. Hal ini dikarenakan kepala daerah *incumbent* sering mencoba menggunakan kebijakan ekonomi ekspansif sebelum pemilihan untuk meningkatkan peluang agar terpilih kembali. Kebanyakan politisi dan non-politisi sama-sama akan menganut pandangan ini, dan istilah ini disebut "ekonomi di tahun pemilu" (Brender and Drazen, 2005). Mereka cenderung melakukannya karena pemilih mudah terpengaruh dalam kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan pemerintah. Jika kepala daerah *incumbent* memiliki pengalaman yang lebih baik dalam mensejahterahkan kondisi ekonomi, masyarakat cenderung memilih pemerintah yang berkuasa (Herzog, 2017). Penelitian Nyblade (2014) menyatakan manipulasi fiskal pra-

pemilu dengan membelanjakan lebih banyak barang public atau menurunkan tarif pajak sebelum pemilihan adalah sebuah alat yang ampuh bagi pemerintah untuk meningkatkan kekuatan ekonomi menjelang pemilu.

Beberapa penelitian telah meneliti fenomena maraknya penggunaan belanja bantuan sosial dan infrastruktur untuk kepentingan politik kepala daerah kepada masyarakat menjelang pemilihan umum karena pada umumnya bantuan sosial dan belanja modal rawan menjadi objek politisasi menjelang pemilu, infrastruktur adalah salah satu dari sedikit prioritas pemerintah (Mullin and Hansen, 2022), dan bantuan sosial paling dapat diharapkan untuk dapat memberikan suara yaitu dengan membagikan sembako kepada masyarakat. Seperti dalam penelitian Arifin dan Purnomowati (2017) yang menemukan adanya alokasi anggaran yang tinggi pada bantuan sosial satu tahun sebelum pemilihan kepala daerah. Menurut peneliti, memberikan bukti yang kuat terjadinya *political budget cycle* yang dilakukan kepala daerah *incumbent* pada tahun Pilkada. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih cenderung menyukai manfaat nyata yang diberikan kepada individu salah satunya yaitu bantuan sosial berupa tunai maupun non-tunai (Samudra, 2019; Rizqiyati dan Setiawan, 2021; Kyriacou, 2021). Penelitian Saito (2009) menemukan adanya peningkatan pengeluaran infrastruktur di daerah pemilihan di Jepang, menurut peneliti infrastruktur merupakan aspek penting bagi persaingan dan kompetisi kepala daerah *incumbent* di Jepang melalui proses elektoral yang iterative. Repetto (2017) menemukan adanya peningkatan 28.5% pengeluaran infrastruktur pada Daerah di Italia pada tahun pemilihan umum kepala daerah. Begitu pula dalam penelitian Mullin and Hansen (2022) menemukan adanya peningkatan pengeluaran infrastruktur di U.S menjelang tahun pemilihan, menurutnya, infrastruktur memberikan keuntungan investasi lebih pasti dan langsung, memungkinkan kepala daerah *incumbent* untuk mendapatkan pujian karena dapat memecahkan masalah pembangunan suatu daerah, sehingga dapat memberikan peluang untuk dipilih kembali.

Beberapa negara telah melakukan penelitian tentang *political budget cycle*. Seperti Vicente *et al* (2013) menemukan bahwa terjadinya *political budget cycle* pada tahun-tahun pemilu di Spanyol, dimana hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada total pengeluaran pada tahun-tahun pemilu dalam kota yang memiliki transparansi keuangan yang rendah. Galli and Rossi (2002) yang menemukan beberapa bukti dari siklus oportunistik, yaitu adanya peningkatan yaitu total belanja, kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta keamanan sosial ditahun-tahun pemilu di Western Lander, German.

Di Indonesia, *political budget cycle* pertama kali diteliti oleh Sjahrir *et al* (2013) yang meneliti siklus anggaran politik (PBC) untuk kabupaten/kota di Indonesia, hanya untuk pemilihan langsung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada siklus anggaran (*political budget cycle*) yang signifikan dalam Pilkada langsung pertama di Indonesia dalam kategori tingkat daerah. Setiawan dan Rizkiah (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi defisit anggaran daerah pada tahun-tahun pemilu. Total belanja tampak meningkat selama tahun pemilu, seiring dengan belanja donasi dan bantuan keuangan. Rizqiyati dan Setiawan (2021), penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada meningkatkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal meningkat dua tahun sebelum pilkada. Sedangkan dalam penelitian Bee and Moulton (2015) ditemukan bahwa tidak adanya *political budget cycle* terhadap peningkatan total pengeluaran atau pendapatan pajak pada tahun-tahun pemilihan dibandingkan dengan tahun-tahun non-pemilu di Amerika Serikat. Tetapi peneliti menemukan bahwa Total pegawai publik meningkat 0,7% ekstra di tahun pemilihan. Departemen kepolisian tumbuh 0,6% lebih cepat di tahun-tahun pemilihan. Pekerja dibidang pendidikan dan sanitasi karyawan, yang mungkin juga pegawai publik yang relatif terlihat, secara statistik peningkatan yang signifikan dalam jumlah mereka selama tahun-tahun pemilu.

Dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *political budget cycle* untuk memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi praktik *political budget* terlebih di Indonesia, dimana penelitian ini masih sedikit dan masih adanya lack dalam penelitian sehingga dalam penelitian ini membangun faktor-faktor yang mempengaruhi *political budget cycle* dengan menggunakan variable tingkat kemandirian daerah, tingkat kemiskinan daerah, dan tingkat pendidikan petahana yang belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang nantinya penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur empiris tentang *political budget cycle* di Indonesia. Dengan keterbaharuan variabel penelitian tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Kemiskinan Daerah, dan Tingkat Pendidikan Petahana terhadap *Political Budget Cycle* Menjelang Pemilu**.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*?
2. Apakah tingkat kemiskinan daerah berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*?
3. Apakah tingkat Pendidikan petahana berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah tingkat kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*.

2. Untuk menguji apakah tingkat kemiskinan Daerah berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*.
3. Untuk menguji apakah tingkat Pendidikan petahana berpengaruh positif terhadap *Political Budget Cycle*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis tentang praktik *political budget*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagi akademisi, riset dan pembaca tentang praktik *political budget cycle* yang dilakukan oleh kepala daerah menjelang pemilu dengan tujuan politik untuk dapat memenangkan Kembali pemilu selanjutnya sehingga penelitian ini dibentuk dengan sampel seluruh wilayah Kabupaten di Indonesia. Belanja pemerintah daerah digunakan untuk menarik dan meningkatkan suara masyarakat. Kedua, peneliti bermaksud mengkaji apakah ada hubungan antara tingkat kemandirian Daerah, tingkat kemiskinan, dan tingkat Pendidikan petahana dengan kekuatan siklus anggaran politik atau tidak.
3. Penelitian ini menggunakan keterbaruan yaitu menggunakan tingkat kemandirian daerah, dan tingkat Pendidikan petahana sebagai variable independent dan total anggaran sebagai variable kontrol yang belum digunakan oleh penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. *Signaling Theory***

*Signaling theory* pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence (1973). Spence (1973) menggambarkan signaling di pasar tenaga kerja yang menunjukkan bagaimana pelamar kerja terlibat dalam suatu perilaku untuk mengurangi asimetri informasi yang menghalangi kemampuan seleksi calon pemberi kerja. Spence mengilustrasikan dengan pelamar kerja dengan prospek berkualitas tinggi harus membedakan diri dari prospek berkualitas rendah dengan sinyal yaitu pendidikan tinggi (Karasek and Bryant, 2012).

Didalam dunia Akuntansi, Teori sinyal terkait dengan asimetri informasi. Hal positif dalam signaling theory adalah dimana perusahaan yang memberikan informasi yang baik akan membedakannya dari perusahaan yang tidak memiliki “good news” dengan menginformasikan pasar tentang kondisinya, sinyal kinerja masa depan yang baik masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak baik tidak akan dipercaya oleh pasar (Etzion and Pe'er, 2013). Dampak pensinyalan pasar pada pasar keuangan telah banyak diteliti, dengan *signaling theory* sebagai landasan teoretis yang kuat yang semakin banyak digunakan dalam manajemen penelitian dan dalam menjelaskan keputusan investasi. Contohnya, penelitian lain menyatakan bahwa sebelum pengumuman laba, aktivitas perdagangan obligasi meningkat karena adanya informasi asimetri sinyal baru yang diberikan oleh perusahaan (Wei and Zhou, 2015). Penelitian lain juga menunjukkan efek kausal yang signifikan dari jurnalisme keuangan dan harga pasar agregat dan bagaimana pengungkapan

manajemen mengirimkan sinyal yang mempengaruhi investor (Koonce, Seybert, and Smith, 2016). Beberapa contoh bervariasi dari teori sinyal menggunakan sinyal seperti penetapan harga penawaran umum perdana (IPO), karakteristik tim manajemen puncak, jumlah dan kualitas aliansi strategis, reputasi wirausaha pendiri dan jumlah politisi kepemilikan saham.

Hal ini juga berlaku untuk situasi menjelang pemilu yang dihadapi oleh kepala daerah: dimana menurut Schleiter and Tavits (2018) mengatakan petahana dalam demokrasi modern sering terlibat dalam perilaku oportunistik—mereka memanipulasi ekonomi, daerah pemilihan dan mengubah waktu pemilihan untuk memberikan sinyal kepada pemilih sehingga membantu prospek pemilihan kembali mereka sehingga, petahana mencoba untuk mengantisipasi kealahannya dalam pemilihan berikutnya, dengan menjalankan “politisasi anggaran” yaitu melakukan defisit anggaran dengan meningkatkan komposisi belanja publik di masa depan sebagai preferensinya (Alesina and Paradisi, 2017). Sebagai calon kepala daerah *incumbent* tentunya memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingannya. Setidaknya ada beberapa modus yang digunakan *incumbent* untuk kepentingan kampanye pribadinya yang dapat memikat hati masyarakat, yaitu dana bantuan sosial, bantuan pembangunan desa, bantuan subsidi, penurunan tarif pajak, dana hibah, pendidikan, kesehatan, serta belanja kepegawaian. Sinyal ini diberikan untuk membantu *incumbent* dapat terpilih Kembali.

Hasil utama dalam teori pensinyalan adalah bahwa ada solusi di mana setidaknya beberapa kebenaran ditransmisikan, misalnya di antara sinyal yang ada, terdapat dua calon kandidat petahana, dimana ada kandidat baru dengan visi, misi serta program kerja yang jelas untuk memajukan daerah yang nantinya mungkin akan menguntungkan bagi penerima (pemilih), dan kandidat yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah yang memiliki kinerja yang terlihat dan pengalaman dalam berpolitik yang akan memberikan manfaat kedepan bagi sebuah daerah dan masyarakat (pemilih). Maka, sebagian besar penerima sinyal



(pemilih) mungkin akan melirik kandidat baru, namun sebagian penerima sinyal (pemilih) lebih menyukai kandidat yang sudah berpengalaman dalam bidangnya (Bohn and Veiga, 2018).

### **2.1.2. Agency Theory**

Teori keagenan berkisar pada isu masalah keagenan dan solusinya (Jensen and Meckling, 1976). Sejarah tanggal masalah agensi kembali ke masa ketika peradaban manusia mempraktikkan bisnis dan berusaha memaksimalkan kepentingannya. Kehadiran masalah agensi telah banyak diteliti di berbagai bidang akademisi. Bukti yang ditemukan di berbagai bidang seperti akuntansi, keuangan, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, perilaku organisasi, dan pemasaran (Ang, Cole, and Lin, 2007).

*Agency Theory* berakar pada ekonomi dan manajemen bisnis. Teori agensi membahas masalah yang muncul di perusahaan karena pemisahan pemilik dan manajer dan penekanan pada pengurangan masalah ini. Teori ini membantu dalam menerapkan berbagai mekanisme tata kelola untuk mengontrol tindakan agen dalam perusahaan yang dimiliki bersama. Hal ini berlaku untuk situasi apa pun di mana satu atau lebih pelaku (prinsipal) harus bergantung pada satu atau lebih pelaku (agen) lain untuk melakukan tugas tertentu bagi mereka (prinsipal). Pemilik (prinsipal) berusaha untuk mempekerjakan seorang manajer (agen) untuk bertindak atas namanya untuk mengoptimalkan keuntungan. Namun, fungsi pembayaran untuk kedua aktor tersebut berbeda, sehingga terjadi asimetri informasi. *Moral hazard* muncul dari tindakan manajer (agen) yang tidak dapat diamati setelah mengadakan kontrak. Pemilik (prinsipal) tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa manajer melakukan upaya yang tepat untuk mengoptimalkan produksi dan keuntungan (Wood, 2011).

Hal ini dapat terjadi dalam pemerintahan daerah, dimana pemerintah pusat (prinsipal) memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang moneter dan fiskal nasional yang di desentralisasikan kepada daerah sebagai *quality improvement*. Namun

implementasi otonomi daerah ini menjadi peluang besar bagi kepala daerah melakukan manipulasi fiskal seperti praktik *political budget* untuk kepentingannya sendiri, dimana kepala daerah *incumbent* (agen) melakukan politisasi anggaran dengan melakukan peningkatan defisit anggaran pada belanja pemerintahan sebagai alat yang bertujuan untuk kepentingan politik terlebih menjelang pemilukada. Kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilukada periode kedua memiliki peluang untuk menggunakan instrument anggaran untuk kepentingan keterpilihannya.

## **2.2. Kajian Pustaka**

### **2.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

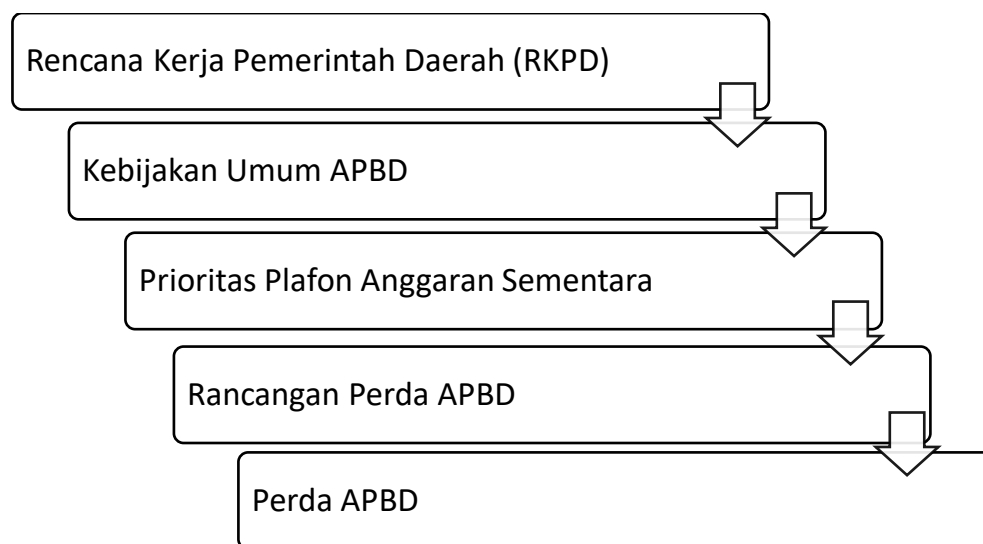
Anggaran sendiri jika dilihat dari sisi politik adalah tentang kekuasaan, yaitu siapa yang memiliki kekuatan untuk memutuskan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran, dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD poses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian bantuan dana untuk menjalankan kewenangan tersebut. Indikasi keberhasilan Otonomi daerah dan desentralisasi ini adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan,serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Keadaan tersebut

dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004).

Mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Proses perencanaan dan penyusunan APBD, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.

### **Gambar 2.1. Tahapan pengelolaan keuangan Daerah**

(Sumber: Kartiwa, 2004)



Menurut Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **2.2.2. Belanja Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

#### **2.2.2.1. Belanja operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa.
- c) Belanja Bunga.
- d) Belanja Subsidi;
- e) Belanja Hibah; dan
- f) Belanja Bantuan Sosial.

#### **2.2.2.2. Belanja modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a) berwujud;
- b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **2.2.2.3. Belanja tidak terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berdasarkan pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Keadaan darurat meliputi:
  - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### **2.2.2.4. Belanja transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

##### **1) Belanja Bagi Hasil**

- a) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a) Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b) Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c) Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

### **2.2.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Dalam hal ide demokrasi dimaknai suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, "oleh rakyat, dan "untuk rakyat": maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi suatu syarat penting dalam pengelolaan sebuah negara. Menurut teori demokrasi empiris berpendapat bahwa partisipasi aktif warga negara sangat penting bagi kualitas demokrasi (Dahl and Robert, 1989). Dalam buku *Making Democracy Work* (Putnam, Leonardi, and Nanetti, 1994) berpendapat bahwa tingkat keterlibatan sipil dengan kondisi yang responsif dan efektivitas pejabat terpilih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga negara.

Secara khusus, para pemimpin dapat mengadopsi keputusan strategis untuk dapat memegang jabatan kembali. Apakah pemimpin terpilih menggunakan keunggulan *incumbent* mereka untuk mendistorsi pembuatan kebijakan dan melayani kepentingan mereka sendiri yang perhatian utama dalam ekonomi politik. Memperlancar pengambilan kebijakan dimasa jabatan harus mengurangi volatilitas ekonomi dan menguntungkan kepentingan yang lebih luas (Alesina and Paradisi, 2017). Namun, memanipulasi anggaran publik yang didorong oleh pemilu mencerminkan ketidaksempurnaan institusi dan demokrasi (Mandon and Cazals, 2019)

### **2.2.4. Incumbent**

*Incumbent* yang memiliki pengalaman dan senioritas dalam bidang politisi serta pernah menjadi kepala daerah, berusaha untuk membuktikan bahwa mereka dapat memenangkan pemilu kembali. Mengingat besarnya keuntungan *incumbent* dalam pemilihan umum, sebuah partai dalam distrik kompetitif, akan menyerahkan keunggulan elektoral ini dengan tujuan akan memberikan dimensi nilai bagi partai. Namun terkadang seorang *incumbent* (petahana) layak dan dapat untuk diganti. Hal ini berlaku untuk petahana yang telah terlibat dalam



penyimpangan seperti kegiatan ilegal, atau kegiatan yang mungkin tidak melanggar hukum, namun melanggar norma perilaku dengan tingkat yang ekstrim. Kasus ini relatif jarang terjadi tetapi sangat berguna dalam memperkirakan sebuah "batas bawah" pada nilai pemilu (Klomp, 2019).

Menurut Rogoff (1987) petahana politik akan mendapatkan dorongan untuk meningkatkan pasokan barang publik yang lebih terlihat sebelum menjelang pemilihan umum, dengan harapan bahwa pemilih (voters) akan mengaitkan hal tersebut sebagai kinerjanya dan kemampuan kompetensinya yang baik sehingga akan memilih kembali untuk masa jabatan berikutnya (Saporiti and Streb, 2008). Petahana mencoba untuk mengantisipasi kekalahan dalam pemilihan berikutnya, dengan menjalankan "politisasi anggaran" yaitu melakukan defisit anggaran dengan meningkatkan komposisi belanja publik di masa depan sebagai preferensinya (Alesina and Paradisi, 2017). Sebagai calon kepala daerah *incumbent* tentunya memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingannya. Dalam beberapa penelitian mengungkapkan juga setidaknya ada beberapa modus yang digunakan *incumbent* untuk kepentingan kampanye pribadinya, yaitu dana bantuan sosial, bantuan pembangunan desa, bantuan subsidi, penurunan tarif pajak, dana transfer, serta belanja kepegawaian. Hal ini dilakukan untuk membantu *incumbent* dapat terpilih Kembali (Corvalan, Cox, and Osorio, 2018).

Ada pula beberapa pemilih (voters) lebih memilih kandidat yang dapat memberikan pertahanan nasional yang kuat atau mengatasi masalah lingkungan ketimbang penyediaan barang public, dan penyediaan bantuan sosial (Akhmedov and Zhuravskaya, 2004). Adapun dalam penelitian Persson dan Svensson mengatakan beberapa pemilih lebih menyukai *incumbent* yang dapat memberikan pendidikan publik dan perawatan kesehatan universal, sementara yang lain lebih suka barang-barang tersebut daripada disediakan secara pribadi (Lambertini, 2003).

### **2.2.5. Tingkat Kemandirian Daerah**

Berdasarkan definisi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (Sasana, 2011). Rondinelli (1989) dijelaskan bahwa otonomi membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high-cost economy*) sekaligus efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal membutuhkan dana yang memadai khususnya bagi implementasi di level daerah. Oleh karenanya salah satu makna desentralisasi fiskal dalam format penyerahan otonomi di bidang keuangan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan (Koethenbueger, 2008).

Desentralisasi fiskal, dikenal adanya filosofi *money follow function*, juga memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Bawono, 2008). Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat (Harsasto, 2014). Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal (Rao, Bird, and Litvack, 1998). Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap APBN khususnya melalui komponen transfer ke daerah dan dana desa (Sularso and Restianto, 2011).

### **2.2.6. Tingkat Kemiskinan**

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih cenderung menuntut pemerintah untuk menyediakan patronase seperti bantuan sosial, Pendidikan, dan kesehatan (Schafer *et al* 2021).

Dalam teori sisi permintaan menunjukkan bahwa masyarakat miskin cenderung lebih memilih manfaat nyata yang diberikan kepada individu, karena kemiskinan memberi mereka cakrawala waktu yang lebih pendek: jika kebutuhan kritis tidak terpenuhi saat ini, kesejahteraan jangka panjang juga sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat miskin cenderung lebih memilih manfaat yang dapat memberikan bantuan secara langsung dan segera (Leighley, Jan, and Nagler, 2013). Alasannya karena manfaat individu mudah dipantau oleh masyarakat miskin, tidak seperti barang yang sudah terprogram (Geddes, 1994). Biasanya dibutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat menerima dan menikmati barang terprogram daripada barang partikularistik, dan masyarakat miskin cenderung tidak mau menunggu barang terprogram tersebut (Kitschelt, 2007). Bahkan ketika mereka bersedia menunggu, masyarakat miskin seringkali tidak mengetahui apakah manfaat terprogram yang dijanjikan telah diberikan. Dan persyaratan informasi untuk pemantauan demokratis atas manfaat tersebut cukup besar (Geddes, 1994).

Namun, ketika masyarakat miskin menginginkan barang-barang yang terprogram ini, cenderung tidak diberikan dan tidak tepat sasaran, seperti Pendidikan gratis dan program kesejahteraan sosial (Katsimi and Sarantides, 2012). Dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik political budget melemahkan akuntabilitas dan melemahkan kinerja pemerintah karena barang-

barang individualistis sering didistribusikan kepada konstituen untuk membantu politisi membangun reputasi pribadi, sumber daya pemerintah yang dihabiskan untuk layanan publik dialokasikan secara kurang efisien (Hicken and Simmons, 2008), dan program pemerintah yang sangat dibutuhkan bertujuan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat ditunda oleh mereka yang menganjurkan kepentingan lain (O'Dwyer, 2006).

### **2.2.7. Tingkat Pendidikan *Incumbent***

Keberhasilan pemilihan petahana sebagian ditentukan oleh kualitas orang tersebut, dan khususnya oleh kompetensi dan integritas petahana. Secara agregat, tujuan kritis pemilih adalah untuk memilih dan memilih kembali wakil-wakil terampil dan berprinsip (Mondak, 1995).

Teori pertama siklus anggaran politik, dikemukakan oleh Rogoff dan Sibert (1988) menjelaskan siklus sebagai konsekuensi dari pemilih yang tidak mengetahui secara sempurna informasi tentang kompetensi kandidat. Informasi kompetensi yang tidak lengkap menimbulkan masalah *moral hazard* karena pemilih mengamati pengeluaran pemerintah dengan lag, dan menghambat kemampuan mereka untuk menilai kompetensi politisi. Ini juga menimbulkan masalah *adverse selection*, karena politisi mengetahui kompetensi mereka sendiri dan pemilih tidak. Sedangkan pemilih tidak dapat mengamati kompetensi atau semua komponen anggaran, sehingga memungkinkan petahana untuk menggunakan sinyal ekspansi fiskal kepada pemilih dalam peningkatan efisiensi administrasi (Bohn and Veiga, 2018).

### **2.2.8. Siklus Anggaran Politik (*Political Budget Cycle*)**

Model *political budget cycle* berasal dari siklus bisnis politik Nordhaus (1975), yang awalnya dikembangkan untuk menunjukkan pengaruh proses pemilu terhadap kondisi ekonomi. Model tersebut menggambarkan perilaku pemerintah berkaitan dengan investasi publik mengingat kondisi politik selama tahun pemilu. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antarwaktu antara kesejahteraan masyarakat ke dan di luar pemilihan umum. Model tersebut menggunakan variabel inflasi dan pengangguran karena pengaruhnya terhadap pilihan politik pemilih. Sebuah pola klasik ditunjukkan dari tingkat pengangguran yang meningkat sebelum pemilu, diikuti oleh peningkatan tingkat pekerjaan setelah pemilu.

Pada tahun 1990, Rogoff mengembangkan model *political budget cycle*, dengan alasan bahwa manipulasi anggaran para petahana memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi pada tahun pemilu. Anggaran pemerintah dengan demikian disalahgunakan untuk tujuan pemilihan ulang. PBC terjadi karena informasi asimetris mengenai kompetensi *incumbent* untuk mengendalikan pemerintah. Petahana lebih sadar akan kompetensinya daripada pemilih; karenanya, manipulasi anggaran berkontribusi pada persepsi pemilih tentang petahana kompetensi, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan suara. Dengan tidak adanya asimetris informasi, PBC tidak mempengaruhi preferensi pemilih, atau tidak efektif. Dalam keadaan seperti itu, preferensi pemilih akan tetap konsisten terlepas dari manipulasi anggaran karena pengetahuan mereka tentang kompetensi demonstrasi petahana (Wiguna, 2021).

Pemilih dapat memilih kandidat yang menawarkan kebijakan publik yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Semua calon potensial, termasuk kepala daerah, bersaing di pemilu dan melakukan manuver politik mereka. Kepala pemerintahan daerah mempunyai kewenangan eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan barang milik daerah. Kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan

anggaran belanja daerah (APBD) sehingga manipulasi anggaran daerah telah terjadi untuk tujuan utama politisi, yaitu untuk mengamankan pemilihan partai politik yang bersangkutan. Manipulasi semacam itu sering mengakibatkan terciptanya siklus anggaran politik di tahun pemilu. Belanja hibah untuk pemerintah desa, belanja bantuan sosial dan hibah meningkat signifikan pada tahun pemilu (Dharma, 2022).

Menurut Wiguna (2021) Terkait dengan belanja, manipulasi anggaran terjadi melalui penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan anggaran pada kategori belanja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan pemilih, dimana dampaknya dapat terlihat dalam waktu yang relatif singkat. Indikator kegiatan jenis ini termasuk peningkatan total belanja, defisit dan item anggaran seperti: kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Selain belanja, manipulasi anggaran juga bisa terjadi terkait pendapatan. Seperti di negara-negara dengan sistem federal, melibatkan sistem transfer dana pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah, pola manipulasi dapat terjadi dalam proses ini (Rogof 1989). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manipulasi semata-mata ditargetkan dalam menciptakan persepsi positif terhadap kepemimpinan pemerintah *incumbent*, dengan bertujuan untuk memaksimalkan kesempatan mereka untuk dipilih kembali (Rogof 1989).

Studi empiris tentang terjadinya *political budget cycle* biasanya berfokus pada defisit anggaran, *political budget cycle* dapat terdeteksi dalam komposisi pengeluaran publik (Katsimi and Sarantides, 2012; Wehner, 2013), kenaikan upah publik (Matschke, 2003), dana federal (Jones *et al.*, 2012), pengeluaran layanan sosial dan kesejahteraan (Nogare and Riccui, 2011), pengeluaran investasi (Repetto, 2018; Drazen and Eslaya, 2010), penurunan tarif pajak dan peningkatan pada layanan publik (Alesina, 2017), belanja sosial (Kyracou, 2021), dan hibah & Subsidi (Samudra, 2019).

### 2.3. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian Veiga and Veiga (2007) mengidentifikasi keberadaan *political budget cycle* di tingkat kota di Portugal selama periode 1979–2001. Pada tahun-tahun pemilu, ada kebijakan ekspansif dalam bentuk peningkatan defisit anggaran dan total belanja. Mereka juga menemukan penurunan penerimaan pajak, pada saat yang sama dengan peningkatan belanja modal dan investasi, suatu jenis belanja yang memiliki visibilitas tinggi pada tahun pemilu. Chortareas et al (2016) juga menganalisis PBC di Yunani pada tingkat kota selama periode 1985-2004. Ini terlihat dalam bentuk peningkatan defisit anggaran, total belanja dan penerimaan berasal dari pinjaman dan transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran investasi ditemukan kategori pengeluaran lain yang menunjukkan peningkatan, yang dibuktikan dengan pesatnya kemajuan proyek dalam waktu yang relatif singkat.

Vicente *et al* (2013) melakukan penelitian tentang *political budget cycle* di 97 Kotamadya terbesar di Spanyol pada periode 1999-2009, peneliti melakukan penelitian terhadap transparansi fiskal pada siklus pemilu. Peneliti menemukan bahwa terjadinya *political budget cycle* pada tahun-tahun pemilu, hasilnya menunjukkan bahwa total pengeluaran meningkat pada tahun-tahun pemilu dalam kota yang memiliki transparansi keuangan yang rendah. *Political budget cycle* pada peningkatan pengeluaran tidak ditemukan di Kota dengan transparansi keuangan yang lebih tinggi. Galli and Rossi (2002) melakukan penelitian tentang *political budget cycle* pada 11 Western German Lander periode 1974-1994, dengan variable anggaran yaitu total anggaran belanja, Kesehatan, Pendidikan, pembangunan jalan dan keamanan sosial. Peneliti menemukan beberapa bukti dari siklus oportunistik, yaitu total expenditure dan setiap kategori pengeluaran serta defisit lebih rendah pada tahun-tahun non pemilu. Faktanya bahwa tiga tahun non-pemilu memiliki tanda negatif yang sama menunjukkan bahwa siklus politik tidak direncanakan: pengeluaran tidak

dipotong secara sistematis tahun pemilu dan semakin meningkat pada tahun berikutnya. Hipotesis ini sepenuhnya dikonfirmasi di kedua spesifikasi total pengeluaran, administrasi dan kesehatan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa adanya defisit yang lebih tinggi pada anggaran ini.

Di Indonesia, *political budget cycle* pertama kali diteliti oleh Sjahrir *et al* (2013) yang meneliti siklus anggaran politik (PBC) untuk kabupaten/kota di Indonesia, hanya untuk pemilihan langsung, bukan untuk pemilihan tidak langsung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada siklus anggaran (*political budget cycle*) yang signifikan dalam Pilkada langsung pertama di Indonesia dalam kategori tingkat daerah. Hal ini dikarenakan bahwa bupati memiliki keleluasaan, terutama jika dia mencalonkan diri kembali. Temuan baru ini mendukung logika di balik PBC: bahwa pemilih (*voters*) dibujuk untuk memilih petahana hanya dalam pemilihan langsung. Dalam pemilihan tidak langsung di Indonesia hubungan antara sponsoring partai dan kandidat terlalu lemah bagi petahana untuk memiliki insentif untuk meningkatkan pengeluaran diskresioner mereka.

Penelitian tentang *political budget cycle* yang dilakukan oleh Setiawan dan Rizkiah (2017) pada 451 kabupaten kota di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada langsung selama periode 2010-2014, penelitian ini mengkaji adanya manipulasi prapemilu melalui perilaku perimbangan anggaran, total belanja, belanja investasi, dan belanja administrasi lainnya termasuk donasi, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan selama tahun pemilu. Hasil penelitian menunjukkan adanya *political budget cycle* yang signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan defisit anggaran daerah pada tahun-tahun pemilu. Total belanja juga tampak meningkat selama tahun pemilu, seiring dengan belanja donasi dan bantuan keuangan. Hasil ini mendukung anggapan bahwa pemilu berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah melalui peningkatan belanja kota, terutama belanja yang sangat terlihat oleh pemilih. Serta penelitian yang dilakukan oleh Rizqyanti dan Setiawan (2021), Penelitian ini mengkaji tentang Siklus Politik Anggaran pada Pilkada di Indonesia,



khususnya di Pulau Jawa, dan memberikan bukti terkait antara transfer pemerintah pusat dengan kewenangan siklus anggaran politik di daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada meningkatkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, sedangkan belanja investasi meningkat dua tahun sebelum pilkada. Asumsi bahwa calon *incumbent* memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan politisasi anggaran tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Selain itu, hubungan antara transfer pusat dan siklus politik anggaran di daerah juga tidak dapat dibuktikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bee and Moulton (2015) melakukan penelitian tentang *political budget cycle* di Kotamadya Amerika Serikat, mereka meneliti pada peningkatan pajak, belanja, dan jumlah karyawan pada tahun pemilu dan non-pemilu pada tahun 1970-2004. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya *political budget cycle* terhadap peningkatan total pengeluaran atau pendapatan pajak pada tahun-tahun pemilihan dibandingkan dengan tahun-tahun non-pemilu. Tetapi peneliti menemukan bahwa Total pegawai publik meningkat 0,7% ekstra di tahun pemilihan. Departemen kepolisian tumbuh 0,6% lebih cepat di tahun-tahun pemilihan. Pekerja dibidang pendidikan dan sanitasi karyawan, yang mungkin juga pegawai publik yang relatif terlihat, secara statistik peningkatan yang signifikan dalam jumlah mereka selama tahun-tahun pemilu.

## **2.4. Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1. Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial**

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya karena hal itu, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran belanja daerah (APBD) sehingga manipulasi anggaran

daerah sering terjadi untuk tujuan utama politisi. Manipulasi semacam itu sering mengakibatkan terciptanya siklus anggaran politik di tahun pemilu.

Menurut Harstanto (2018) Belanja bantuan sosial, merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai bagi *incumbent* untuk memikat hati pemilih untuk mendapatkan dukungan. Alokasi belanja publik yang dinikmati langsung oleh masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan popularitas dan kemungkinan *incumbent* untuk dipilih Kembali (Ahmedov and Zhuravskaya, 2004; Drazen and Eslavasa, 2010; Dharma, 2022) sehingga peluang petahana memanfaatkan belanja bantuan sosial disebabkan penanganan dana sosial yang langsung berada di tangan kepala daerah menjadikan dana tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik para petahana. Menurut Dharma (2022) Belanja bantuan sosial memberikan peluang bagi *incumbent* untuk menggunakan anggaran tersebut untuk tujuan politik terutama menjelang pemilukada. Dharma (2022) juga mengatakan kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan kinerja dan *political budget* bansos terhadap perolehan suara pada pemilukada. Tingginya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah maka belanja bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah juga akan semakin besar menjelang pemilukada (Puput,2014)

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, tingkat kemandirian daerah diharapkan dapat berhubungan positif dengan *political budget cycle*.

H1: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja bantuan sosial.

#### **2.4.2. Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Namun, manipulasi anggaran daerah sering terjadi untuk tujuan pribadi terutama tujuan politik atau disebut siklus anggaran politik di tahun pemilu.

Menurut Dharma (2022) Kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap keterpilihan kepala daerah *incumbent*, sehingga semakin tinggi kemampuan keuangan yang dimiliki suatu Daerah, maka akan meningkatkan pengeluaran belanja modal karena hal tersebut memberikan gambaran akan kemampuan kepala daerah *incumbent* dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Saito (2009) "*infrastructure as the magnet of power*". ketika kepala daerah *incumbent* melakukan investasi infrastruktur dan melakukan perubahan dalam pembangunan di suatu daerah, kepala daerah *incumbent* akan memperoleh keuntungan elektoral dan sangat mungkin untuk dapat terpilih Kembali setelah pemilu berikutnya. Furdas, Homolkova, and Kis-Katos (2015) menganalisis terjadinya siklus anggaran politik di 604 kota di Jerman Barat antara tahun 1975 dan 2007 yang menemukan bahwa adanya pengeluaran yang lebih tinggi untuk pos anggaran yang sangat terlihat oleh publik, investasi bangunan, serta hibah yang lebih tinggi untuk tujuan investasi.

Mempertimbangkan bahwa beberapa investasi mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan, mengharapkan *incumbent* untuk mulai meningkatkan pengeluaran investasi di tahun sebelum pemilu, untuk memberi sinyal kompetensi yang lebih besar kepada pemilih. Semakin tinggi kemampuan keuangan daerah maka semakin besar pula peluang bagi kepala daerah *incumbent* untuk melakukan praktik *political budget* terhadap belanja modal menjelang pemilukada karena dengan kemampuan keuangan daerah yang baik maka kepala daerah mampu melaksanakan pembangunan daerahnya sebagai strategi untuk memperoleh suara di pemilukada selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, tingkat kemandirian daerah diharapkan dapat berhubungan positif dengan *political budget cycle*.

H1a: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal asset tetap lainnya.

H1b: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal Gedung dan bangunan.

H1c: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal irigasi dan jalan.

H1d: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal peralatan dan mesin.

H1e: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal tanah.

#### **2.4.3. Tingkat Kemiskinan terhadap Belanja Bantuan Sosial**

Pengeluaran pemerintah sering diperdebatkan menjadi salah satu pengaruh utama dalam pengentasan kemiskinan (Anderson et al., 2018). Beberapa peneliti berpendapat bahwa pengeluaran publik merupakan instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan (Fan et al, 2007; Sergiy, 2006; Lal & Sharma, 2009; Duan, 2018). Beberapa negara maju dan berkembang di dunia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat secara efektif meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat miskin dan dengan demikian mengurangi kemiskinan (Gittell, 2010).

Di negara maju, pengeluaran kesejahteraan publik dan pengeluaran pendidikan yang dilaksanakan di Amerika Serikat, jaminan sosial dan kesejahteraan pengeluaran yang diterapkan di Inggris, dan sistem fiskal kesejahteraan pusat dan daerah Denmark menghasilkan hasil yang baik dalam mengentaskan kemiskinan. Negara-negara anggota OPEC harus berinvestasi lebih banyak pada kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan sosial (Olopade et al., 2019). Di negara berkembang, kebijakan pengeluaran fiskal seperti skema pembayaran transfer pedesaan dan lapangan kerja skema keamanan yang diterapkan di India dapat secara efektif mengentaskan kemiskinan (Gaiha and Imai, 2002; Lal and Sharma, 2009). Subsidi non-makanan di Filipina memiliki efek pengentasan kemiskinan yang lebih baik daripada subsidi makanan (Conchada and Rivera, 2013).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faust, Jörg; Leiderer, Stefan; Schmitt, Johannes (2012) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan disuatu negara mempengaruhi *political budget* pada peningkatan pengeluaran bantuan sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Perhatian yang diberikan dari pemerintah terhadap masyarakat memberikan dampak positif pada potensial dari program-program ini terhadap penerimaan suara dari masyarakat pada hasil pemilu (Liu, Li, and Zhao, 2020). Semakin tingginya tingkat kemiskinan daerah, maka semakin besar peluang kepala daerah *incumbent* melakukan praktik *political budget* terhadap belanja bantuan sosial menjelang pemilukada sebagai bentuk program kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diharapkan dapat berhubungan positif dengan *political budget cycle*.

H2: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja sosial.

#### **2.4.4. Tingkat Kemiskinan terhadap Belanja Modal**

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak

barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Infrastruktur adalah konsep luas yang mencakup investasi publik dalam bentuk aset fisik aset dan layanan sosial. Desakan untuk meningkatkan investasi publik di daerah-daerah berasal dari pandangan bahwa infrastruktur adalah penentu utama pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan kapasitas masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat dari proses pertumbuhan (Ogun,2010). Penelitian tentang kemiskinan telah mengungkapkan lebih jauh bahwa masyarakat miskin memiliki masalah paling mendasar adalah kurangnya aset. Adjei, Arun, and Hossain (2009) mengkonfirmasi bahwa kemiskinan adalah fenomena multi-dimensi dan pembangunan aset memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa penelitian berpendapat bahwa investasi baik dalam infrastruktur fisik maupun sosial dapat mengurangi kemiskinan.

Semakin tinggi kemiskinan daerah maka semakin besar pula peluang bagi kepala daerah *incumbent* untuk melakukan praktik *political budget* terhadap belanja modal menjelang pemilu karena beberapa penelitian berpendapat bahwa investasi baik dalam infrastruktur fisik maupun sosial dapat mengurangi kemiskinan. Menurut Castro and Martins (2017) strategi melakukan praktik *political budget* pada peningkatan pengeluaran belanja modal menjelang pemilu masih efektif digunakan terutama di negara berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan diharapkan dapat berhubungan positif dengan *political budget cycle*.

H2a: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal aset tetap lainnya.

H2b: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal Gedung dan bangunan.

H2c: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal irigasi dan jalan.

H2d: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal peralatan dan mesin.

H2e: Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap *political budget* belanja modal tanah.

#### **2.4.5. Tingkat Pendidikan *Incumbent* terhadap Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal**

Menurut Kezar (2004) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap terciptanya integritas yang dimiliki oleh seseorang, karena Pendidikan berkontribusi dalam mendidik untuk keterlibatan demokratis, mengembangkan bakat intelektual, melestarikan pengetahuan dan menciptakan pemimpin untuk berbagai bidang sektor public. Integritas diyakini sebagai salah satu hal penting untuk mengukur kualitas pemimpin.

Menurut Bohn and Veiga (2018) Petahana dengan kompetensi yang rendah tidak mengetahui kompetensinya sendiri – dalam penelitian Shi dan Svensson (2006). Hal ini karena dia selalu menghadapi tugas dan tantangan baru atau ingin memulai program baru dan tidak dapat meramalkan seberapa efisien dia dapat mengelola anggarannya. Petahana yang tidak mengetahui kompetensinya sendiri, akan memiliki insentif untuk menyediakan barang publik tambahan agar terlihat lebih kompeten dimata masyarakat. Biasanya, kepala daerah sering mengklaim bahwa mereka merasa terdorong untuk memberikan manfaat individu karena konstituen mereka menginginkan manfaat tersebut, dan berharap akan meningkatkan peluang pemilihannya, karena politisi tidak memiliki keuntungan informasi, tidak ada signaling, hanya moral hazard. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala daerah *incumbent*, maka akan cenderung tidak melakukan praktik *political budget* terhadap belanja modal dan belanja sosial menjelang pemilukada untuk kepentingan politik,

secara tidak ekonomis, efektif dan efisien hanya untuk kepentingan pribadi. Kepala daerah yang memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami subjek abstrak politik, kepatuhan pada peraturan yang ada, serta kemampuan meneliti dan mengevaluasi isu-isu global.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini, tingkat pendidikan *incumbent* diharapkan dapat berhubungan positif dengan *political budget cycle*.

H3: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja sosial.

H3a: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja modal asset tetap lainnya.

H3b: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja modal Gedung dan bangunan.

H3c: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja modal irigasi dan jalan.

H3d: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja modal peralatan dan mesin.

H3e: tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh negatif terhadap *political budget* belanja modal tanah.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

##### 3.1.1. Populasi Penelitian

Studi ini menggunakan pengumpulan data panel belanja bantuan sosial dan belanja modal pada 398 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah langsung serentak atas periode 2017,2018,2020.

##### 3.1.2. Sampel Penelitian

Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini. Peneliti mengambil tiga periode pilkada yaitu Pilkada 2017, 2018, dan 2020 dengan pengamatan masing-masing tiga tahun pada Kota dan Kabupaten Daerah yang dipimpin oleh *Incumbent* atau kepala daerah yang sudah menjabat selama berturut-turut. Tahun-tahun tersebut dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data terbaru dan pada tahun tersebut Pilkada dilaksanakan secara serentak.

Kriteria *purposive sampling*:

**Table 3.1** Tabel *purposive sampling*

Jumlah Kota dan Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2017,2018,2020	398
<i>Non-incumbent</i>	150
<i>Incumbent</i>	248

### **3.2. Jenis Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui variabel-variabel penelitian dan dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Suliyanto,2017).

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup tiga jenis data: ekonomi (anggaran pemerintah daerah), demografi (tingkat kemandirian daerah, tingkat kemiskinan daerah), dan biografi (tingkat Pendidikan petahana), serta isu politik (tahun pemilu, dan incumbency). Data fiskal meliputi total anggaran, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Data diperoleh yaitu melalui *APBD* yang dipublikasikan pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia selama periode 2017,2018,2020. Data diterbitkan oleh LPH BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder Data terkait belanja pemerintah daerah, persentase tingkat kemandirian daerah, dan total anggaran diperoleh dari LHP BPK. Demografi data untuk variabel tingkat kemiskinan daerah data tersebut dikumpulkan dari BPS (Badan Pusat Statistik), dan biografi *incumbent* untuk variable tingkat Pendidikan petahana diperoleh melalui Wikipedia, KPU, dan Website kabupaten. Terakhir, data politik terdiri dari waktu dan hasil setiap pemilihan kepala daerah, petahana yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain KPU, Kemendagri, dan Perludem.

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1. Variabel Dependen

##### 3.4.1.1. *Political Budget Cycle*

Pengukuran yang digunakan *political budget cycle* dalam penelitian ini:

a. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. (Permendagri Nomor 77).

Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui peningkatan belanja bantuan sosial dalam penelitian ini:

$$\text{Belanja bantuan sosial} = \frac{Y - Y_{-1}}{Y_{-1}} \times 100\%$$

b. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (Permendagri Nomor 77).

Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui peningkatan belanja bantuan sosial dalam penelitian ini:

$$\text{Belanja modal} = \frac{Y - Y_{-1}}{Y_{-1}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

Y= tahun pemilukada (2020,2018,2017)

Y<sub>-1</sub>= satu tahun sebelum pemilukada (2019,2017,2016)

### 3.4.2. Variabel Independen

#### 3.4.2.1. Tingkat Kemandirian Daerah

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemanfaatan anggaran daerah dapat dilakukan karena memang salah satu kewenangan kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD.

Besarnya tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Namun dalam penelitian ini rasio tingkat kemandirian daerah diperoleh melalui LKPP yang diterbitkan oleh BPK.

Menurut Agustina (2013); Nugroho (2017); Marsudi (2019) kriteria besar kecilnya tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Kriteria tingkat kemandirian daerah**

<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase PAD</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

- Pola hubungan instruktif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.

- Pola hubungan konsultatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang lebih banyak karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan mulai mampu melaksanakan urusan otonomi (peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- Pola hubungan delegative, yaitu hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah tidak ada lagi karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam otonomi daerah

#### **3.4.2.2. Tingkat Kemiskinan**

Masyarakat miskin adalah mereka yang standar konsumsinya tidak sesuai dengan norma atau yang pendapatannya berada di bawah garis tersebut (Ukperre & Slabbert, 2009) .

Metode pengukuran tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik adalah Persentase Penduduk Miskin (*Headcount Index/P0*)

#### **3.4.2.3. Tingkat Pendidikan *Incumbent***

Tingkat pendidikan secara konsisten dapat meningkatkan partisipasi politik, jumlah pemilih, keterlibatan sipil, pengetahuan politik, dan sikap dan pendapat demokratis (Sunshine Hillygus, 2005).

Metode pengukuran tingkat Pendidikan petahana adalah dummy variabel.

Tingkat pendidikan S2 – S3 = 1

Tingkat pendidikan SMA – S1 = 0

### 3.4.3. Variabel Control

#### 3.4.3.1. Total Anggaran Belanja

Kebijakan melebihi pengeluaran terhadap pendapatan disebut anggaran defisit, sedangkan kebijakan pengeluaran pendapatan yang lebih tinggi dapat disebut sebagai keadaan surplus. Dengan kata lain, pemerintah daerah mengidentifikasi memiliki keadaan defisit anggaran ketika pengeluaran saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang diterima melalui operasi standar (Brender dan Drazen 2005; dan Chortareas et al. 2016).

**Table 3.3 Variabel Operasional**

Variabel	Pengukuran	Pengertian variabel	Perolehan data
Political Budget Cycle	Belanja Bantuan Sosial (Harstanto,2018; Dharma, 2022). $\frac{Y - Y_{-1}}{Y_{-1}} \times 100\%$	Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. (Permendagri Nomor 77)	LKPD

	<p>Belanja Modal (Chortareas,2016; Repetto,2018)</p> $\frac{Y - Y_{-1}}{Y_{-1}} \times 100\%$	<p>Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (Permendagri Nomor 77)</p>	LKPD
Pemilukada	<p>Dummy variable 1= tahun pemilukada 0 = non-pemilukada</p>	<p>Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)</p>	KPU
<i>Incumbent</i>	<p>Variable dummy 1= incumbent 0= non incumbent</p>	<p>Individu yang sudah berpengalaman menjadi kepala daerah lebih dari 1 kali masa jabatan</p>	KPU
Tingkat Kemiskinan	<p>Persentase Penduduk Miskin (<i>Headcount Index/P0</i>) (BPS)</p>	<p>Masyarakat miskin adalah mereka yang standar konsumsinya tidak sesuai dengan norma atau yang pendapatannya berada di bawah garis tersebut (Ukpere &amp; Slabbert, 2009)</p>	BPS
Tingkat kemandirian daerah	<p><math>Y = \frac{PAD}{transfer} \times 100\%</math> (J. Marsudi, 2019)</p>	<p>Kemampuan suatu daerah dalam mengelola daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.</p>	LKPP BPK
Tingkat pendidikan petahana	<p>Dummy variable (0 dengan kriteria SMA, dan S1, dan 1 dengan kriteria S2-S3)</p>	<p>tingkat pendidikan secara konsisten dapat meningkatkan</p>	Wikipedia Website Pemda

	(Bohn & Veiga, 2018)	partisipasi politik, jumlah pemilih, keterlibatan sipil, pengetahuan politik, dan sikap dan pendapat demokratis (Sunshine Hillygus, 2005)	
Total Anggaran	Surplus/ deficit anggaran	selisih kurang pendapatan daerah dengan belanja daerah.	LKPD

### 3.5. Model Penelitian

*The empirical model for the analysis is as follows:*

$$BV_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Inc} + \beta_2 \text{tahun pilkada} + \beta_3 (\text{Inc} \times \text{TKMDi}) + \beta_4 (\text{Inc} \times \text{TKDi}) + \beta_5 (\text{Inc} \times \text{TPPi}) + \beta_6 \text{TBi} + \varepsilon \dots$$

#### **Keterangan:**

BV<sub>it</sub> = Pengeluaran belanja modal dan belanja bantuan sosial untuk daerah i pada waktu 2017,2018,2020.

β<sub>1</sub>= tahun pemilukada 2017,2018,2020 .

β<sub>2</sub>= kepala daerah *incumbent*

β<sub>3</sub> TKMDi= tingkat kemandirian daerah

β<sub>4</sub> TKDi= Tingkat kemiskinan daerah

β<sub>5</sub> TPPi= tingkat pendidikan petahana

β<sub>6</sub> TBi= variable control total anggaran...

ε error



## **3.6. Metode Analisis Data**

### **3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menyediakan informasi dasar tentang variabel dalam dataset dan menonjolkan potensi hubungan antar variabel (Ghozali, 2016). Penyajian data statistik deskriptif biasanya dalam bentuk diagram atau tabel. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai *mean*, *median*, *maksimum*, *minimum*, dan *standard deviation* (Ghozali,2016).

### **3.6.2. Analisis Regresi Data Panel**

Teknik analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan penggabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data time series berupa data satu tahun menjelang pemilu pada dan tahun pemilu pada 2020,2018,2017 dan data cross-section yaitu 398 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melalui kriteria penyampelan data. Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat uji evIEWS 10.

Menurut Wooldridge (Ghozali & Ratmono, 2020) data dengan karakteristik panel adalah data yang berstruktur urut waktu sekaligus *cross section*. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat robust terhadap beberapa tipe pelanggaran asumsi Gauss Markov, yaitu heterokedastisitas dan normalitas.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi regresi dengan data panel, antara lain:

#### **a. Common effect model (CEM)**

Teknik paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model panel. Model ini dikenal dengan estimasi common effect. Dalam

pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu (Ghozali & Ratmono, 2020).

**b. Fixed effect model (FEM)**

Model ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variable dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model estimasi ini seringkali disebut dengan Teknik least square dummy variabels (LSDV) (Ghozali & Ratmono, 2020).

**c. Random effect model (REM)**

Dimasukkan variable dummy didalam model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, pada akhirnya mengurangi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variable gangguan yang dikenal dengan metode random effect. Didalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variable gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Ghozali & Ratmono, 2020).

### **3.6.3. Metode Pemilihan Model**

Terdapat beberapa pengujian untuk memilih Teknik estimasi data panel yaitu:

- a. Uji Chow, adalah pengujian untuk menentukan model *fixed effect* dan *common effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengambilan keputusan dilakukan jika:
  - Nilai prop  $F < 0.05$ , maka memilih *fixed effect* dari pada *common effect*.
  - Nilai prop  $F > 0.05$ , maka memilih *common effect* daripada *fixed effect*.
- b. Uji hausman, adalah pengujian statistic untuk memilih apakah model *fixed effect* atau random effect yang paling tepat digunakan. Pengambilan keputusan dilakukan jika:
  - Nilai prob chi squares  $< 0.05$ , maka memilih *fixed effect* dari pada *random effect*.

Nilai prob chi squares  $> 0.05$ , maka memilih *random effect* daripada *fixed effect*.

- c. Uji laverage multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect (OLS). Pengambilan keputusan dilakukan jika:

Nilai p value  $< 0.05$ , maka tolak  $H_0$  atau memilih random effect daripada common effect.

Nilai p value  $> 0.05$ , maka terima  $H_0$  atau memilih common effect daripada random effect.

### **3.7. Uji Hipotesis**

#### **3.7.1. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-Fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, bila  $R^2 = 0$  berarti tidak ada hubungan yang sempurna atau menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan apabila  $R^2 = 1$  maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2016).

#### **3.7.2. Uji F test**

Uji pengaruh bersama-sama (joint) digunakan untuk mengetahui apakah variable independent secara Bersama-sama atau joint mempengaruhi variable dependent. Menurut Ghozali (2016), dasar pengambilan keputusan adalah jika *p value*  $< 0,05$  atau F hitung  $> F$  tabel maka  $H_a$  terdukung. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Jika nilai signifikan lebih besar dari  $\alpha$  maka hasilnya ditolak, yang berarti model regresi tidak *fit*. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  maka model regresi layak dan dapat dilakukan uji tahap berikutnya (Ghozali,2016).

### 3.7.3. Uji t test

Uji parsial (t tes) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable dependent.

Kriteria untuk uji statistik t dengan melihat *probability value* (sig)-t maka:

- 1) Jika *p value* < 0,05 maka  $H_a$  diterima, artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika *p value* > 0,05  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.4. Variabel Dummy

Jika variable independent berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variable tersebut harus dinyatakan sebagai variable dummy dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu). Setiap variable dummy menyatakan satu kategori variable independent non-metrik, dan setiap variable non-metrik dengan K kategori dapat dinyatakan dalam k-1 variabel dummy (Ghozali,2016).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Incumbent dan pilkada tidak berpengaruh terhadap peningkatan belanja sosial menjelang pemilukada, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan belanja Gedung dan bangunan menjelang pemilukada.

Menurut Saito (2009) "*infrastructure as the magnet of power*". ketika kepala daerah incumbent melakukan perubahan dalam pembangunan sebuah daerah, kepala daerah *incumbent* akan memperoleh keuntungan elektoral dan sangat mungkin untuk dapat terpilih Kembali setelah pemilu berikutnya sehingga kepala daerah mungkin tidak lebih memperhatikan belanja bantuan sosial karena kepentingan politik mereka kurang terindikasi pada pengeluaran bantuan sosial, dan mungkin tidak memiliki rencana untuk berpartisipasi lagi dalam pilkada periode kedua.

2. Tingkat kemandirian daerah yang dipimpin oleh kepala daerah incumbent tidak berpengaruh terhadap peningkatan belanja sosial menjelang pemilukada, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan belanja modal peralatan dan mesin.

Semakin tinggi kapasitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah, semakin beragam program yang dapat dilakukan kepala daerah untuk kesejahteraan rakyat salah satunya peningkatan produksi dalam memanfaatkan sumber daya alam suatu daerah

dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti perbaikan kualitas layanan mesin sehingga seringkali peningkatan pada belanja peralatan dan mesin tersamarkan oleh pemilih. Belanja modal ini dapat memberikan masa manfaat jangka Panjang untuk memberikan pelayanan public, dengan tujuan melakukan pembangunan dan perbaikan sector Kesehatan, Pendidikan, pertanian, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat peningkatan tersebut. Hal akan memberikan peluang bagi kepala daerah incumbent untuk melakukan praktik *political budget* agar dapat terpilih Kembali di pemilukada berikutnya, karena dimata pemilih hal ini dinilai sebagai kinerja pemerintah daerah.

3. Tingkat kemiskinan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah incumbent berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan belanja sosial menjelang pemilukada, dan tidak berpengaruh terhadap belanja modal menjelang pemilukada.

Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian ini, semakin tinggi tingkat kemiskinan daerah, maka kepala daerah incumbent akan meningkatkan deficit belanja sosial sebagai strategi politiknya untuk dapat terpilih Kembali diperiode pemilukada berikutnya. Hal ini karena masyarakat miskin cenderung lebih memilih manfaat nyata yang diberikan kepada individu seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan subsidi, karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan pelayanan sosial yang layak sehingga masyarakat miskin cenderung lebih memilih manfaat dapat memberikan manfaat bantuan secara langsung dan segera.

4. Tingkat pendidikan petahana berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan belanja sosial menjelang pemilu, dan tidak berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal menjelang pemilu.

Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis dalam penelitian ini yang dimana seharusnya semakin tinggi tingkat Pendidikan petahana maka tidak berpengaruh terhadap manipulasi fiskal seperti political budget, karena semakin tingginya tingkat Pendidikan, kepala daerah incumbent akan cenderung menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Amanah yang diberikan, dan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu transparan dan akuntabel. Karena Pendidikan akan membentuk skill, pengetahuan, dan attitude dari individu tersebut, sehingga kepala daerah incumbent yang memiliki Pendidikan yang tinggi akan mengetahui mana yang menjadi prioritas dan efisiensi dari anggaran yang dikeluarkan, sehingga Petahana mengetahui kompetensinya sendiri, dan dapat meramalkan seberapa efisien dalam mengelola anggarannya. Namun bagi petahana yang tidak mengetahui kompetensinya sendiri dan memiliki ambisi yang tinggi, akan memiliki insentif untuk menyediakan barang public tambahan, pembagian bantuan sosial/hibah yang tidak tepat waktu, dan sasaran hanya agar terlihat lebih kompeten dimata masyarakat dan meningkatkan peluang pemilihannya kembali karena politisi tidak memiliki keuntungan informasi, tidak ada signaling, hanya *moral hazard*.

Hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa dari ketiga faktor yang dapat meningkatkan praktik *political budget*; tingkat kemandirian daerah, tingkat kemiskinan daerah, dan tingkat Pendidikan petahana, daerah yang dipimpin oleh kepala daerah incumbent memiliki strategi yang berbeda untuk memenuhi ambisinya agar dapat terpilih Kembali sebagai kepala daerah di pemilukada selanjutnya. Siklus praktik *political budget* ini cenderung dan akan terjadi berulang kali di setiap level pemerintahan.

Jika dilihat dari hasil penelitian diatas, strategi meningkatkan belanja bantuan sosial pada saat menjelang pemilukada masih efektif dan sering digunakan oleh kepala daerah incumbent, terlihat dari belanja bantuan sosial yang meningkat sebesar 440.25% menjelang pemilukada, hal ini dikarenakan belanja bantuan social dapat dinikmati secara langsung dan dapat memikat hati masyarakat sehingga meningkatkan popularitas dan kemungkinan kepala daerah *incumbent* dapat terpilih kembali, dan penanganan dana ini pula ditangani langsung oleh kepala daerah, sehingga menjadikan dana tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik. Namun, ketidakstabilan dalam pengeluaran investasi juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya yang merugikan perekonomian nasional.

Hasil penelitian ini memperkuat *signaling theory* dan *agency theory* pada akuntansi sektor public dimana pemerintah pusat (prinsipal) memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bidang moneter dan fiscal nasional yang di desentralisasikan kepada daerah sebagai *quality improvement*. Namun implementasi otonomi daerah ini menjadi peluang besar bagi kepala daerah melakukan manipulasi fiskal seperti praktik *political budget* untuk kepentingannya sendiri, dimana kepala daerah incumbent (agen) melakukan politisasi anggaran dengan melakukan peningkatan defisit anggaran pada belanja pemerintahan sebagai alat yang bertujuan untuk kepentingan politik menjelang pemilukada. Situasi menjelang pemilu yang dihadapi oleh kepala daerah incumbent dalam demokrasi modern sering terlibat dalam perilaku oportunistik—mereka memanipulasi



ekonomi untuk memberikan sinyal kepada pemilih tentang kompetensi yang dimiliki oleh kepala daerah incumbent selama menjabat, sehingga membantu prospek pemilihan kembali mereka. Kepala daerah incumbent mencoba untuk mengantisipasi kekalahannya dengan menjalankan “politisasi anggaran” yaitu melakukan defisit anggaran dengan meningkatkan komposisi belanja publik di masa depan sebagai preferensinya yang bertujuan untuk memikat hati masyarakat sebagai pemilih yang nantinya akan memberikan meningkatkan jumlah suara dipemilukada sehingga berdampak pada pentingnya strategi manajerial pemilukada serentak di Indonesia. Pemilukada yang sudah dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah dengan biaya tinggi masih ditambah lagi dengan perilaku oportunistik kepala daerah incumbent maupun kepala daerah non-incumbent dalam menyusun APBD dengan menyusun program-program yang bukan prioritas kesejahteraan masyarakat tetapi difokuskan pada program jangka pendek untuk meningkatkan popularitas kepala daerah untuk melanggengkan jabatannya sebagai kepala daerah.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu:

1. Kajian ini memiliki keterbatasan jumlah observasi, dimana tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia diikutsertakan dalam kajian ini Beberapa kabupaten dan kota di Indonesia yang dikecualikan dari sampel adalah kabupaten dan kota yang tidak mengadakan pemilu ditahun 2020,2018,2017.
2. Dalam penelitian ini masih ada kabupaten/kota yang datanya tidak lengkap namun diikutsertakan dalam sampel ini.
3. Hasil penelitian dari variabel kontrol total anggaran belanja tidak berpengaruh terhadap semua variabel independent.
4. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor politik lainnya yang mungkin juga mempengaruhi penelitian.

### 5.3. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti memberikan saran:

1. Siklus anggaran politik ini cenderung dan akan terjadi berulang kali di setiap level pemerintahan saat menjelang pemilu/kada, terutama di negara-negara berkembang dan demokrasi baru. Bagi Pemerintah Daerah disarankan untuk dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yaitu perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Oleh karena itu pentingnya melakukan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variable lain seperti transparansi daerah, populasi daerah, jumlah pengangguran daerah, dan tingkat Pendidikan masyarakat. Lalu melakukan penelitian pada pengeluaran belanja-belanja daerah lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel tahun, dan melengkapi data kabupaten/kota yang tidak lengkap sebelumnya.
4. Hasil penelitian dari variabel kontrol total anggaran belanja tidak berpengaruh terhadap semua variabel independent sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel kontrol lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADJEI, J., ARUN, T., & HOSSAIN, F. (2009). Asset Building and Poverty Reduction in Ghana: The Case of Microfinance. *Savings and Development*, 266-291.
- Agustina., O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, 1-11.
- Akhmedov, A., & Zhuravskaya, E. (2004). Opportunistic Political Cycles: Test in a Young Democracy Setting. *The Quarterly Journal of Economics*, 1301–1338. doi:doi:10.1162/0033553042476206
- Alesina, A., & Paradisi, M. (2017). Political budget cycles: Evidence from Italian cities. *economic & politic*, 1–20.
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490.
- Anderson, A., Click, B., Ramos-Rivers, C., Ioannis, & Hashash, J. G. (2018). The Association Between Sustained Poor Quality of Life and Future Opioid Use in Inflammatory Bowel Disease. *Inflamm Bowel Dis*, 1380-1388.
- Ang, J. S., Cole, R. A., & Lin, J. W. (2007). Agency Costs and Ownership Structure. *The Journal of Finance*, 55(1), 81–106.
- Arifin, T., & Purnomowati, N. H. (2017). Government Expenditure, Political Cycle and Rent Seeking. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 461-468.
- Ariyanto, D., & Dewi, A. A. (2019). Oportunistik Incumbent dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(1), 41-55.
- Arvin, M. B., Pradhan, R. P., & Nair, M. S. (468-489). Does Government Spending Improve Welfare in Middle-income Countries? *Economic Analysis and Policy*, 70, 2021.
- Barreiro, B. (2008). *Explaining the Electoral Performance of Incumbents in Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bawono, A. D. (2008). Keadilan Prosedural Dalam Hubungan Antara Budgetary Goal Characteristics dan Kinerja Manajerial Pejabat Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 151-161.
- Bee, A., & Moulton, S. R. (2015). Political budget cycles in U.S. municipalities. *Econ Gov*, 16, 379–403.
- Bohn, F. (2018). Political budget cycles, incumbency advantage, and propaganda. *Wiley Economic & Politic*, 1-28.  
doi:<https://doi.org/10.1111/ecpo.12122>
- Bohn, F., & Veiga, F. J. (2018). Political Budget Forecast Cycles. *Nipe*, 1-44.  
Retrieved from <https://www.eeg.uminho.pt/pt/investigat/nipe>
- Bostashvili, D., & Ujhelyi, G. (2019). Political budget cycles and the civil service: Evidence from highway spending in US states. *Journal of Public Economics*, 175, 17-28.
- Brender, A., & Drazen, A. (2003). Where Does the Political Budget Cycle Really Come from? *NBER Working Paper*. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=462820>
- Brender, A., & Drazen, A. (2005). Political budget cycles in new versus established democracies. *Journal of Monetary Economics*, 52, 1271–1295.
- Castro, V., & Martins, R. (2016). Are there political cycles hidden inside government expenditures? *Applied Economics Letters*, 23(1), 34-37.
- Chortareas, Logosmetis, & Papandreu. (2016). Political budget cycles and reelection prospects in Greece's municipalities. *Eur J Polit Econ*, 1–13.
- Corvalan, A., Cox, P., & Osorio, R. (2018). Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities. *Journal of Development Economics*, 1-48.
- Dahl, & Robert. (1989). Democracy and Its Critics . *New Haven, CT:Yale University Press*.
- Dash, B. B., Ferris, S., & Winer, S. (2018). The measurement of electoral competition, with application to Indian states. *Electoral Studies*, 62, 102070.
- Dharma, F. (2022). *Kinerja Pemerintah Daerah dan Political Budget: Pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Incumbent pada Pemilu*. Pekalongan, Jawa Tengah: NEM - Anggota IKAPI.
- Dodlova, M., & Zudenkova, G. (2021). Incumbents' performance and political extremism. *Journal of Public Economics*, 1-18.

- Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92, 39–52.
- Duan, & Wang. (2018). Who is Better for Rural Poverty Reduction Fiscal Support Agriculture or Urbanization. *Journal of Guizhou University of Finance and Economics*, 5(196), 86-95.
- Efthyvoulou, G. (2012). Political budget cycles in the European Union and the impact of political pressures. *Public Choice*, 153, 295–327.
- Eryılmaz, F. (2015). The effects of elections on monetary policy in Turkey: An evaluation in terms of Political Business Cycle Theory. *CADEMICA BRÂNCUȘI” PUBLISHER*, 1-14.
- Etzion, D., & Pe'er, A. (2013). Mixed signals: A dynamic analysis of warranty provision in the automotive industry, 1960–2008. *Strategic Management Journal*, 35(11), 1605-1625.
- Fan, Brzeska, & Shields, G. (2007). Investment Priorities for Economic Growth and Poverty Reduction. *International Food Policy Research Institute (IFPRI)*. .
- Faust, J., Leiderer, S., & Schmitt, J. (2012). Financing poverty alleviation vs. promoting democracy? Multi Donor Budget Support in Zambia. *Democratization*, 19(3), 438-479.
- Fiorina, M. P. (1977). The Case of the Vanishing Marginals: The Bureaucracy Did It. *The American Political Science Review*, 71(1), 177-181.
- Furdas, M., Homolkova, K., & Kis-Katos, K. (2015). Local Political Budget Cycles in a Federation: Evidence from West German Cities\*. *IZA Discussion Paper*, 1-53.
- Gaiha, R., & Imai, K. (2002). Rural Public Works and Poverty Alleviation-the Case of the Employment Rural Public Works and Poverty Alleviation-the Case of the Employment. *International Review of Applied Economics*, 131-151. doi:<https://doi.org/10.1080/02692170110118876>
- GALLI, E., & ROSSI, S. P. (2002). Political budget cycles: The case of the Western German Länder. *Public Choice*, 283-303.
- Geddes, B. (1994). Challenging the Conventional Wisdom. *Journal of Democracy*, 5(4), 104-118.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika; Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gittell, R. (2010). The wider impacts of BRAC poverty comparative perspectives on the relationship of public finance and poverty. *Public Finance and Management*, 10(6), 405-410.
- Gonzalez, M. d. (2002). Do Changes in Democracy Affect the Political Budget Cycle? Evidence from Mexico. *Review of Development Economics*, 6(2), 204–224.
- Griliches, Z. (1963). The Sources of Measured Productivity Growth: United States Agriculture . *Journal of Political Economy*, 331-346.
- Hanusch, M., & cycles, P. K. (2014). Younger parties, bigger spenders? Party age and political. *European Economic Review*, 72, 1-18.
- Harsasto, P. (2014). POLITIK SIKLUS ANGGARAN LOKAL (STUDI APBD KOTA SURAKARTA MENJELANG PILKADA 2010). *POLITIKA*, 5(1), 1-12.
- Haryanto, J. T. (2018). KEMANDIRIAN DAERAH DAN PROSPEK EKONOMI WILAYAH KALIMANTAN. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 312-328.
- Herzog, B. (2017). Does transparency mitigate the political budget cycle? *Journal of Economic Studies*, 44(5), 666-689.
- Hicken, A., & Simmons, J. W. (2008). The Personal Vote and the Efficacy of Education Spending. *American Journal of Political Science*, 52(1), 109-124.
- Hyde, S. D. (2011). Catch Us If You Can: Election Monitoring and International Norm Diffusion. *American Journal of Political Science*, 55(2), 356-369.
- Ingram, R. W., & Copeland, R. M. (1981). Municipal Accounting Information and Voting Behavior. *The Accounting Review*, 54(4), 830-843.
- J. Marsudi, A. S. (2019). Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah: kajian pada provinsi jawa barat. *Jurnal Universitas Djuanda (Unida)*, 5(2), 33-46.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Kalwij, A., & Verschoor, A. (2007). Not by growth alone: The role of the distribution of income in regional diversity in poverty reduction. *European Economic Review*, 805–829.
- Karasek, R., & Bryant, P. (2012). Signaling Theory: Past, Present, and Future. *Academy of Strategic Management Journal*, 11(1), 91-100.
- Kartiwa, H. (2004). PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM. *Academia*, 1-22.
- Katsimi, M., & Sarantides, V. (2012). Do elections affect the composition of fiscal policy in developed, established democracies? *Public Choice*, 151, 325–362.
- Kezar, A. (2004). Obtaining Integrity? Reviewing and Examining the Charter between Higher Education and Society. *The Review of Higher Education*, 27(4), 429–459.
- Kitschelt, H. (2007). Growth and Persistence of the Radical Growth and Persistence of the Radical. *West European Politics*, 1176-1206. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/01402380701617563>
- Klomp, J. (2019). Election or Disaster Support? *The Journal of Development Studies*, 1-16. doi:<https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1585811>
- Klomp, J., & Haan, J. d. (2013). Political budget cycles and election outcomes. *Public Choice*, 157, 245–267. doi:DOI 10.1007/s11127-012-9943-y
- Koethenbueger, M. (2008). Revisiting the “Decentralization Theorem”—On the role of externalities. *Journal of Urban Economics*, 64(1), 116–122.
- Koonce, L., Seybert, N., & Smith, J. (2016). Management Speaks, Investors Listen: Are Investors Too Focused on Managerial Disclosures? *Journal of Behavioral Finance*, 17(1), 31-44 .
- Kyriacou, A. P., Okabe, T., & Roca-Sagalés, O. (2021). Conditional political budget cycles: The role of time preference. *Economics & Politics*, 1–25. doi:DOI: 10.1111/ecpo.12187
- Lal, & Sharma. (2009). Private Household Transfers and Poverty Alleviation in Rural India: 1998-1999. *The Journal of applied Economic Research*, 32, 97-112. doi:<https://doi.org/10.1177/097380100900300201>
- Lambertini, L. (2003). Are Budget Deficits Used Strategically? *SSRN*. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=1443808>

- Leighley, Jan, & Nagler, J. (2013). *Who Votes Now?: Demographics, Issues, Inequality, and Turnout in the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- LG, V., & FJ, V. (2007). Political business cycles at the municipal level. *Public Choice*, 131, 45–64.
- Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2020). Rural Public Expenditure and Poverty Alleviation in China: A Spatial Econometric Analysis. *Journal of Agricultural Science*, 46-56. doi: <https://doi.org/10.5539/jas.v12n6p46>
- Mandon, P., & Cazals, A. (2019). POLITICAL BUDGET CYCLES: MANIPULATION POLITICAL BUDGET CYCLES: MANIPULATION RESEARCHERS? EVIDENCE FROM A META-REGRESSION ANALYSIS. *Economic Survey*, 33(1), 274–308. doi:doi: 10.1111/joes.12263
- MATSCHKE, X. (2003). Are there election cycles in wage agreements? An analysis of German public employees. *Public Choice*, 114, 103–135.
- Mondak, J. J. (1995). Competence, Integrity, and the Electoral Success of Congressional Incumbents. *The Journal of Politics*, 57(4), 1043-1069.
- Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 134-144.
- Muksin, D., Robo, S., & Pawane, A. R. (2021). Political Motives for the Plan for the Expansion of New Autonomous Regions in Papua. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(2), 221 – 238.
- Mullin, M., & Hansen, K. (2022). Local News and the Electoral Incentive to Invest in Infrastructure . *American Political Science Review*, 1-6.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 288.
- Nogare, C. D., & Ricciuti, R. (2011). Do term limits affect fiscal policy choices? *European Journal of Political Economy* , 681–692.
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 169-190.
- Nugroho, P. (2017). ANALISIS ATAS KEMANDIRIAN PEMDA DALAM MENGELOLA KEUANGANNYA. *Jurnal PKN STAN*, 105-118. Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/64>



- Nyblade, B. (2014). Playing with Fire: Pre-Electoral Fiscal Manipulation and the Risk of a Speculative Attack. *International Studies Quarterly*, 38, 828–838.
- O'Dwyer, C. (2006). *Runaway State-Building: Patronage Politics and Democratic Development*. Johns Hopkins University Press.
- Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., & Asaleye, A. J. (2019). Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02279>
- Persson, M. (2003). Review Article: Education and Political Participation. *British Journal of Political Science*, 45(3), 689–703. doi:doi:10.1017/s0007123413000409
- Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Does centralization increase the size of government? *European Economic Review*, 38(3-4), 765–773. doi:10.1016/0014-2921(94)90112-0 . *European Economic Review*, 765–773. doi:doi:10.1016/0014-2921(94)90112-0
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). *Making Democracy Work: Civic Making Democracy Work: Civic*. New Jersey: Princeton University Press.
- Rao, Bird, & Litvack. (1998). Fiscal Decentralization and Poverty Alleviation in a Transitional Economy: The Case of Viet Nam. *Asian Economic Journal*, 12(4), 353–378. doi:doi:10.1111/1467-8381.00068
- Repetto, L. (2018). Political budget cycles with informed voters: evidence from Italy. *The Economic Journal*. doi:doi:10.1111/eoj.12570
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). APAKAH INCUMBENT MEMANFAATKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENCALONKAN KEMBALI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 1-25.
- Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2021). Political Budget Cycle on The Regional Elections in Indonesia. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 13(1), 85-98.
- Rogoff, K. (1987). EQUILIBRIUM POLITICAL BUDGET CYCLES. *NBER Working Paper*.
- Rogoff, K., & Sibert, A. (1988). Elections and Macroeconomic Policy Cycles. *The Review of Economic Studies*, 55(1), 1-16.

- Rondinelli, & A. , D. (1989). Decentralizing Public Services in Developing Countries: Issues and Opportunities. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 14(1), 77-85.
- Saito, J. (2009). Infrastructure as the Magnet Explaining Why Japanese Legislators Left and Returned to the LOP. *Journal of East Asian Studies*, 467-493.
- Saito, J. (2009). Infrastructure as the Magnet of Power: Explaining Why Japanese Legislators Left and Returned to the LOP. *Journal of East Asian Studies*, 9, 467-493.
- Samudra, A. (2019). Political Budget Cycle: A Case Study of General Elections in India. *International Journal of Commerce and Management Studies (IJCAMS)*, 4(3), 1-6.
- Saporiti, A., & Streb, J. M. (2008). Separation of powers and political budget cycles. *Public Choice*, 137, 329–345.
- Sasana, H. (2011). Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 46-48.
- Schafer, J., Cantoni, E., Belletini, G., & Belletini, G. (2021). Making Unequal Democracy Work? The Effects of Making Unequal Democracy Work? The Effects of. *American Journal of Political Science*, 1-17.
- Schleiter, P., & Tavits, M. (2018). Voter Reactions to Incumbent Opportunism. *The journal of politics*, 80(4), 000-000. doi:10.1086/698758
- Sergiy, Z. (2006). Improving agricultural fiscal policy in Ukraine . *Working Paper*, 1-36.
- Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). POLITICAL BUDGET CYCLES IN MUNICIPALITIES: EVIDENCE FROM INDONESIA. *International Journal of Business and Society*, 18, 533-546.
- Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). POLITICAL BUDGET CYCLES IN MUNICIPALITIES: EVIDENCE FROM INDONESIA. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533-546.
- Shi, M., & Svensson, J. (2003). Political Budget Cycles: A Review of Recent Developments. *Nordic Journal of Political Economy*, 29, 67-76.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120, 342-345.
- Soffle, C. J. (1993). The politics of budgeting. *The Bottom Line*, 6(2), 9-16.

- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH. *Media riset akuntansi*, 1(2), 109-124.
- Suliyanto. (2017). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. *PELATIHAN METODOLOGI PENELITIAN*.
- Sunshine Hillygus, D. (2005). The MISSING LINK: Exploring the Relationship Between Higher Education and Political Engagement. *Political Behavior*, 27(1), 25–47. doi:doi:10.1007/s11109-005-3075-8
- Tirtosudarmo, R. (2007). *Mencari Indonesia: Demografi-politik pasca-Soeharto*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ukperere, W. I., & Slabbert, A. D. (2009). A relationship between current globalisation, unemployment, inequality and poverty. *Journal of Social Economics*, 36(2), 37-46.
- Veiga, L. G., & Veiga, F. J. (2007). Political business cycles at the municipal level. *Public Choice*, 45-64.
- Vicente, C., Benito, B., & Bastida, F. (2013). Transparency and Political Budget Cycles at municipal level. *Swiss Political Science Review*, 19(2), 139–156.
- Wei, J., & Zhou, X. (2015). Informed Trading in Corporate Bonds Prior to Earnings Announcements. *Financial Management*, 45(3), 641-674.
- Wiguna, G. E. (2021). Political budget cycle patterns and the role of coalition parties in shaping Indonesian local government spending. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5, 41–64.  
doi:https://doi.org/10.1007/s41685-020-00186-0
- Wood, D. (2011). Agency Theory and the Bureaucracy. *The Oxford Handbook of American Bureaucracy*, 1-30.  
doi:10.1093/oxfordhb/9780199238958.003.0008

**Sumber Lain:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019